

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_, *Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 4 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- \_\_\_\_\_, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- \_\_\_\_\_, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.*
- Andriyan, Y. (2021). Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2019. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 3(1), 47-54.
- Apriliani, A., Ginaldo, K., & Seran, M. Y. (2024). Administrasi Pertanggung Jawaban (SPJ). *Karimah Tauhid*, 3(1), 673-681.
- Ariadi, W. (2021). *Manajemen Belanja Daerah Dalam Konsep dan Analisis*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Dali, N., Mirosea, N., Tamburaka, I., Harafah, L. O., & Akib, M. (2023). Pengaruh Sumberdaya Manusia dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laoran Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kolaka. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, 8(2), 216-227.
- Kusuma, I. P., Prabandari, L. C., & Restami, M. P. (2023). Sistem Informasi Pengarsipan Surat Pertanggungjawaban Berbasis Web Badan Penanggulangan Bencana Daerah Buleleng. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer*, 9(4).
- Luddin, J., Rahmawati, R., & Suparwi. (2023). Efektivitas dan Efisiensi Anggaran. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (JMAS)*, 4, 275-287.
- Moenek, R., & Suwanda, D. (2019). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sari, P., & Sazly, S. (2021). Prosedur Pelayanan Perpanjangan IPTM Pada Sudin Pertamanan Dan Hutan Kota TPU Tegal Alur Unit Kristen Jakarta Barat. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 1(2), 103-111.

Supardan, H. (2020). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Malang: Media Nusa Creative.

Wati, S. M., & Nugraheni, A. P. (2020). Analisis Faktor Penghambat Penyusunan SPJ Pengeuaran di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Magelang. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah (JESYA)*, 232-239.